PROCEEDINGS CONFERENCE SISI INDONESIA III
Tut Wuri Handayani: Development of Education, Science and Technology, and Humanity for the Progress of the Indonesian People
https://conference.sinesia.id/ncrcs-sinesia | E-ISSN: 3110-1062 |
https://doi.org/10.69836/ncrcs-sinesia

Teori Permainan dalam Perancangan Kebijakan Publik: Interaksi Strategis, Kredibilitas, dan Reformasi Institusional di Demokrasi Berkembang

Game Theory in Public Policy Design: Strategic Interaction, Credibility, and Institutional Reform in Emerging Democracies

Ari Wibowo
ari_wibowo@kemenkeu.go.id
Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

Info Article
Submitted: 27 April 2026 | **Revised**: 12 May 2026 | **Accepted**: 14 May 2026
How to cite: Ari Wibowo, "Teori Permainan dalam Perancangan Kebijakan Publik: Interaksi Strategis, Kredibilitas, dan Reformasi Institusional di Demokrasi Berkembang", *Proceedings Conference Sisi Indonesia III*, 2026, P. 55-67.

ABSTRACT

Public policy reform in emerging democracies is often approached as a technical and administrative process. However, many reforms experience stagnation, symbolic compliance, and implementation failure despite extensive regulatory changes. This study addresses the problem that policy reforms frequently overlook the strategic interaction among institutional actors that shapes reform outcomes. Using an integrated game-theoretic framework, this article analyses reform as an equilibrium outcome determined by incentive structures, institutional credibility, enforcement mechanisms, and actor expectations. This study employs a qualitative-conceptual approach using static games, repeated games, signaling theory, coordination games, and mechanism design. The findings show that reform failure may emerge as a stable Nash equilibrium when bureaucratic resistance provides higher short-term payoffs than compliance. Repeated game analysis demonstrates that cooperation can be sustained when actors value long-term interactions supported by monitoring, audit systems, reputational incentives, and credible sanctions. Under asymmetric information, rhetorical reforms tend to produce pooling equilibria that weaken institutional trust, while costly and institutionalized reforms generate separating equilibria that strengthen credibility. The study further finds that policy effectiveness depends not only on regulatory design but also on the ability to shift strategic parameters such as enforcement probability, incentive alignment, signaling costs, and long-term orientation. Indonesia's bureaucratic delayering and state asset management reforms are used as illustrative cases. The article concludes that public policy reform should be understood as strategic institutional engineering aimed at creating stable cooperative equilibria rather than merely introducing formal legal changes.

Keyword: *game theory, public policy reform, strategic interaction, institutional credibility, mechanism design*

ABSTRAK

Reformasi kebijakan publik di negara demokrasi berkembang sering dipahami sebagai proses teknis dan administratif. Namun, dalam praktiknya banyak reformasi mengalami stagnasi, kepatuhan simbolik, dan kegagalan implementasi meskipun perubahan regulasi telah dilakukan secara luas. Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa reformasi kebijakan sering mengabaikan interaksi strategis antar aktor institusional yang menentukan hasil reformasi. Dengan menggunakan kerangka teori permainan terintegrasi, artikel ini menganalisis reformasi sebagai hasil keseimbangan (equilibrium) yang dibentuk oleh struktur insentif, kredibilitas institusional, mekanisme penegakan, dan ekspektasi aktor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual melalui model permainan statis, permainan berulang, teori signaling, permainan koordinasi, dan mekanisme desain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan reformasi dapat muncul sebagai Nash equilibrium yang stabil ketika resistensi birokrasi memberikan payoff jangka pendek lebih tinggi dibandingkan kepatuhan. Analisis permainan berulang menunjukkan

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

bahwa kerja sama dapat dipertahankan apabila aktor memiliki orientasi jangka panjang yang diperkuat melalui monitoring, audit, reputasi, dan sanksi yang kredibel. Dalam kondisi informasi asimetris, reformasi yang bersifat retoris cenderung menghasilkan pooling equilibrium yang melemahkan kepercayaan institusional, sedangkan reformasi yang memiliki biaya nyata mampu menghasilkan separating equilibrium yang meningkatkan kredibilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi kebijakan publik harus dipahami sebagai rekayasa institusional strategis untuk menciptakan keseimbangan kooperatif yang stabil, bukan sekadar perubahan regulasi formal.
Kata Kunci: *teori permainan; reformasi kebijakan publik; kredibilitas institusional; desain mekanisme; demokrasi berkembang*

Pendahuluan

Reformasi kebijakan publik di negara-negara demokrasi berkembang sering kali dipandang sebagai upaya teknis dalam perancangan ulang institusi, penyesuaian regulasi, atau modernisasi administrasi. Namun, perspektif tersebut semakin tidak memadai untuk menjelaskan kegagalan reformasi yang berulang dalam berbagai konteks tata kelola. Berbagai kajian menunjukkan kegagalan kebijakan tidak dapat direduksi semata-mata pada kelemahan dalam perumusan teknis, melainkan dipengaruhi oleh interaksi strategis yang kompleks antara eksekutif politik, birokrasi, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, memahami reformasi kebijakan menuntut pendekatan strategis-institusional yang secara eksplisit mempertimbangkan insentif, ekspektasi, dan saling ketergantungan antar aktor.

Pendekatan analisis kebijakan tradisional menekankan pentingnya perencanaan rasional, formulasi berbasis bukti, serta implementasi yang efektif sebagai fondasi tata kelola yang baik (Majone, 1989; Howlett et al., 2009). Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang secara optimal sering gagal dalam tahap implementasi. Kegagalan tersebut disebabkan oleh fragmentasi otoritas dan kegagalan koordinasi antar aktor, bukan semata-mata oleh kelemahan desain kebijakan (Pressman & Wildavsky, 1973). Upaya reformasi melalui pendekatan *New Public Management* yang menekankan efisiensi, manajerialisme, dan pengukuran kinerja (Hood, 1991) juga menunjukkan keterbatasan ketika dihadapkan pada kompleksitas institusional dan dinamika tawar-menawar politik (Pollitt & Bouckaert, 2017). Dengan demikian, proses kebijakan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan optimasi teknis, melainkan arena interaksi strategis yang dibentuk oleh struktur insentif dan kekuasaan.

Institusi publik tidak dapat dipandang sebagai mekanisme implementasi yang netral, melainkan sebagai arena strategis yang dihuni oleh aktor rasional maupun terbatas rasionalitasnya. Scharpf (1997) menggambarkan proses kebijakan sebagai *games real actors play*, di mana hasil ditentukan oleh saling ketergantungan strategis antar aktor. Perilaku birokrasi dipengaruhi oleh insentif institusional dan pertimbangan karier (Bendor et al., 1985; Moe, 1984), sementara administrasi publik dapat dipahami sebagai sistem kontrak insentif dalam kerangka politik (Horn,

1995). Dalam sistem demokrasi, keberadaan veto *players* semakin memperkuat dimensi strategis, karena perubahan kebijakan memerlukan persetujuan dari berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda (Tsebelis, 2002).

Di luar interaksi strategis, tantangan mendasar dalam demokrasi berkembang adalah kredibilitas institusional. Institusi berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian melalui pengaturan insentif (North, 1990), tetapi efektivitasnya bergantung pada kredibilitas komitmen yang dihasilkan. Lemahnya penegakan hukum, tingginya diskresi politik, dan ketidakpastian akibat pergantian kekuasaan sering kali mengurangi kredibilitas kebijakan. Komitmen yang tidak kredibel menurunkan kepercayaan dan kepatuhan, serta menghambat investasi jangka panjang (Weingast, 1995).

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas institusi demokrasi memengaruhi penyediaan barang publik karena kemampuannya membangun kredibilitas komitmen (Keefer & Stasavage, 2003). Dalam konteks seperti Indonesia, reformasi sering menghadapi dilema kredibilitas, di mana dukungan bersifat retoris tetapi disertai strategi perlindungan kepentingan jangka panjang. Reformasi yang tampak inklusif dapat tetap mempertahankan struktur ekstraktif (Acemoglu & Robinson, 2012), sementara kapasitas negara menentukan kemampuan untuk menegakkan komitmen yang kredibel (Besley & Persson, 2009).

Meskipun literatur mengenai kebijakan publik dan institusi telah berkembang luas, terdapat kesenjangan teoretis dalam mengintegrasikan analisis interaksi strategis dengan kredibilitas institusional. Teori administrasi klasik menekankan rasionalitas terbatas (Simon, 1947), sementara pendekatan inkrementalisme melihat perubahan kebijakan sebagai proses bertahap (Lindblom, 1959). *Advocacy Coalition Framework* menyoroti peran sistem kepercayaan dan pembelajaran kebijakan (Sabatier, 1988). Namun, pendekatan-pendekatan tersebut belum sepenuhnya memformalkan interdependensi strategis maupun menjelaskan bagaimana keseimbangan kebijakan terbentuk.

Dalam konteks ini, teori permainan menyediakan kerangka analitis yang lebih kuat untuk memahami kebijakan sebagai hasil interaksi strategis. Sejak dikembangkan oleh von Neumann dan Morgenstern (1944), teori permainan memungkinkan analisis formal atas keputusan yang saling bergantung. Konsep *Nash equilibrium* (Nash, 1950) menunjukkan bahwa hasil kebijakan merupakan hasil respons optimal antar aktor. Perkembangan lebih lanjut memasukkan informasi tidak lengkap dan desain mekanisme (Myerson, 1991; Osborne & Rubinstein, 1994), sehingga memungkinkan analisis yang lebih realistis terhadap lingkungan kebijakan publik. Namun, penerapan teori permainan dalam desain kebijakan publik masih relatif terbatas (McCain, 2009), dan lebih banyak digunakan dalam konteks politik elektoral dibandingkan reformasi institusional (Dixit & Nalebuff, 1991; McCarty & Meirowitz, 2007).

Pendekatan keseimbangan juga penting dalam memahami stabilitas kebijakan. Beberapa kebijakan yang tidak optimal dapat bertahan karena merupakan keseimbangan yang stabil dalam struktur insentif yang ada (Harsanyi & Selten, 1988; Aumann, 1987). Dalam konteks dinamis, konsep *subgame perfect equilibrium* menekankan kredibilitas dalam setiap tahap interaksi (Selten, 1975; Fudenberg & Tirole, 1991), sementara reputasi dapat mendorong kerja sama dalam interaksi berulang (Kreps et al., 1982). Teori permainan berulang menunjukkan bahwa kerja sama dapat dipertahankan jika aktor cukup menghargai masa depan (Fudenberg & Levine, 1989; Mailath & Samuelson, 2006), dan strategi pemicu dapat menjaga kepatuhan melalui ancaman sanksi (Abreu et al., 1990; Kandori, 2002).

Selain itu, asimetri informasi memainkan peran penting dalam reformasi kebijakan. Teori signaling menunjukkan bahwa tindakan reformasi dapat berfungsi sebagai sinyal komitmen (Spence, 1973), tetapi hanya sinyal yang mahal (*costly signals*) yang kredibel (Milgrom & Roberts, 1986; Holmström, 1979). Komunikasi yang bersifat *cheap talk* memiliki keterbatasan dalam membangun koordinasi (Crawford & Sobel, 1982; Farrell & Rabin, 1996; Aumann & Hart, 2003). Dalam praktik kebijakan publik, reformasi yang tidak terlembagakan cenderung menghasilkan *pooling equilibrium* yang melemahkan kredibilitas.

Reformasi kebijakan juga sering menghadapi masalah koordinasi dan aksi kolektif. Dalam kerangka *prisoner's dilemma*, aktor memiliki insentif untuk menyimpang meskipun kerja sama menghasilkan manfaat bersama (Axelrod, 1984; Ostrom, 1990). Sementara itu, permainan koordinasi seperti *assurance game* menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi bergantung pada ekspektasi bersama (Cooper et al., 1992; Van Huyck et al., 1990). Dalam sistem pemerintahan multilevel, koordinasi menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai tingkat otoritas (Hooghe & Marks, 2001; Scharpf, 1997).

Kredibilitas institusional menjadi faktor penentu dalam pemilihan keseimbangan. Mekanisme komitmen seperti aturan konstitusional dan pembatasan hukum dapat meningkatkan kredibilitas (Schelling, 1960; Elster, 2000; Weingast, 1995; Ginsburg, 2003). Selain itu, sifat *irreversibility* dan *path dependence* dalam institusi menunjukkan bahwa keputusan awal dapat membentuk trajektori jangka panjang (Pierson, 2000; Mahoney, 2000).

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas penerapan teori permainan pada studi kebijakan publik dan reformasi institusional. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan dalam merancang reformasi yang tidak hanya normatif secara regulatif, tetapi juga stabil secara strategis melalui desain insentif, *enforcement*, dan mekanisme koordinasi yang lebih efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis berbasis teori dengan pemodelan formal teori permainan *(game theory)* untuk menjelaskan dinamika reformasi kebijakan publik dalam konteks demokrasi berkembang. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana interaksi strategis antara eksekutif, birokrasi, legislatif, dan aktor institusional lainnya membentuk hasil reformasi dalam kerangka ekuilibrium. Reformasi dipahami sebagai hasil kalkulasi strategis dalam struktur insentif tertentu, bukan sekadar proses administratif linear. Secara operasional, penelitian menggunakan model permainan statis nonkooperatif untuk menganalisis interaksi antara reformasi dan resistensi birokrasi melalui konsep Nash equilibrium dan *backward induction*. Penelitian juga menggunakan *repeated game* untuk menjelaskan keberlanjutan kerja sama melalui *discount factor* (δ) dan mekanisme reputasi, *signaling game* untuk menganalisis kredibilitas reformasi dalam kondisi informasi asimetris, serta *coordination game* untuk menjelaskan kegagalan koordinasi dalam sistem *multilevel governance*. Model dibangun dengan asumsi bahwa aktor bersifat *boundedly rational* dan berupaya memaksimalkan utilitas berdasarkan insentif politik, administratif, dan ekonomi. Struktur permainan dipengaruhi oleh parameter utama berupa *discount factor* (δ), *enforcement probability* (p), *signaling cost* (c), dan *incentive alignment* (Δ). Penelitian menggunakan data sekunder berupa regulasi, dokumen reformasi birokrasi, laporan pemeriksaan, dan laporan kinerja pemerintah sebagai dasar interpretasi kontekstual terhadap model yang dibangun. Dengan mengintegrasikan pemodelan teori permainan dan analisis institusional, penelitian ini menjelaskan reformasi kebijakan sebagai hasil interaksi strategis yang dipengaruhi oleh insentif, kredibilitas, dan kendala institusional.

Hasil dan Pembahasan

1. Reformasi Kebijakan sebagai Interaksi Strategis dan Model Dasar

Reformasi kebijakan publik dalam penelitian ini tidak hanya sebagai proses administratif linear, namun juga sebagai hasil dari interaksi strategis antaraktor yang saling bergantung. Dalam kerangka ini, kebijakan tidak memiliki daya transformasi secara inheren. Kebijakan hanya menjadi efektif apabila mampu mengubah struktur insentif sehingga kepatuhan menjadi strategi yang rasional. Keberhasilan reformasi bukan berasal dari kualitas desain normatif, tetapi dari kompatibilitasnya dengan logika keputusan aktor.

Pendekatan ini memperluas *actor-centered institutionalism* dengan menekankan bahwa institusi bukan sekadar aturan formal, tetapi juga mekanisme pembentuk ekspektasi strategis (Scharpf, 1997). Aktor tidak bereaksi terhadap kebijakan secara pasif, melainkan secara aktif mengantisipasi respons aktor lain. Dalam konteks ini, muncul fenomena *anticipatory equilibrium*, di mana

keputusan saat ini ditentukan oleh ekspektasi terhadap respons di masa depan. Hal ini semakin kompleks dalam sistem dengan *multiple veto players*, di mana setiap aktor dapat mengubah probabilitas keberhasilan reformasi (Tsebelis, 2002).

Keputusan eksekutif tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat prospektif. Melalui *backward induction*, birokrasi akan memilih resistensi jika *payoff* resistensi lebih tinggi dibandingkan kepatuhan. Eksekutif yang rasional akan mengantisipasi hal ini, sehingga reformasi kehilangan kredibilitas bahkan sebelum diimplementasikan. Untuk memperjelas struktur insentif, berikut representasi matriks *payoff* sebagai berikut.

Tabel 1. Matriks *Payoff* Permainan

	Birokrasi Patuh (C)	Birokrasi Resistensi (D)
Eksekutif R	(3,3)	(1,4)
Eksekutif S	(2,2)	(2,2)

Penjelasan:

- (R,C): Reform berhasil, *payoff* tinggi bagi kedua pihak.
- (R,D): Reform gagal, birokrasi diuntungkan jangka pendek.
- (S,–): Stabil, tetapi tanpa perubahan.

Dalam konteks Indonesia, struktur ini menjelaskan fenomena *delayering*, proses eliminasi struktural eselon pejabat di Indonesia, yang dipahami sebagai penurunan utilitas (status, kekuasaan, karier), sehingga resistensi menjadi strategi rasional. Akibatnya, reformasi berhenti pada perubahan formal tanpa transformasi substantif.

2. *Equilibrium, Institutional Trap,* dan Kegagalan Reformasi

Untuk memahami stabilitas reformasi, diperlukan analisis pada level keseimbangan. Interaksi antara kredibilitas dan keselarasan insentif dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Diagram 1. Interaksi Kredibilitas dan Keselarasan Insentif

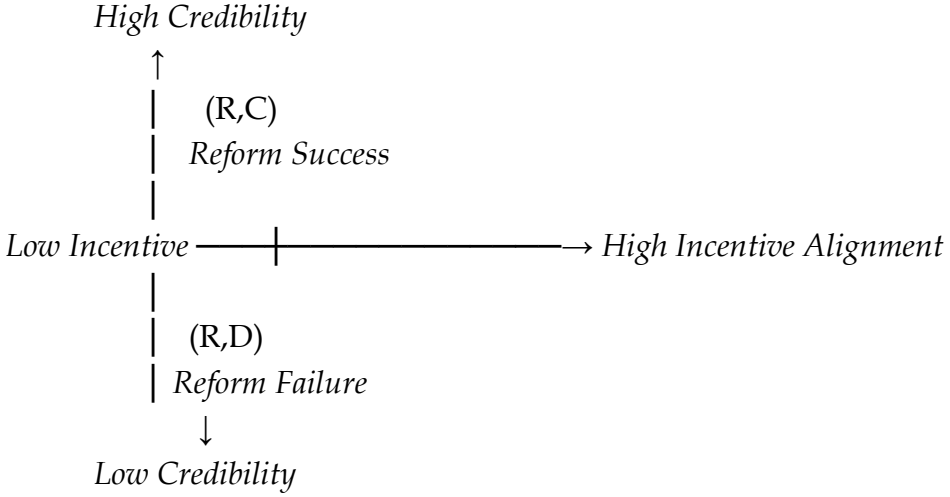


Diagram ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hanya terjadi ketika dua kondisi terpenuhi secara simultan: kredibilitas tinggi dan insentif selaras. Jika salah satu rendah, sistem akan jatuh pada keseimbangan non-kooperatif.

Kondisi (R,D) mencerminkan *institutional trap*, yaitu situasi di mana strategi rasional individu menghasilkan outcome kolektif yang inferior (Scharpf, 1997). Dalam konteks BMN, unit kerja mempertahankan aset idle karena kehilangan kontrol tidak diimbangi dengan insentif alternatif. Ini menghasilkan keseimbangan yang stabil tetapi tidak efisien.

Tabel 2. Matriks Payoff Permainan

Jenis Ekuilibrium	Karakteristik	Dampak
(R,C) Kooperatif	Insentif selaras, kredibel	Reform berhasil
(R,D) Konfliktual	Resistensi rasional	Reform gagal
(S,–) Status quo	Stabil moderat	Tidak ada perubahan

Yang penting ditekankan adalah bahwa kegagalan reformasi bukan merupakan deviasi dari rasionalitas, melainkan konsekuensi dari rasionalitas itu sendiri dalam struktur insentif yang tidak optimal. Oleh karena itu, reform failure adalah *equilibrium problem* (Tsebelis, 2002).

3. Dinamika Intertemporal, Kredibilitas, dan Koordinasi

Ketika dimensi waktu dimasukkan, struktur insentif berubah secara fundamental. Dalam permainan berulang, aktor mempertimbangkan payoff jangka panjang, sehingga membuka ruang bagi kerja sama. Parameter kunci di sini adalah *discount factor* (δ), seperti tersaji dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jenis Parameter

Nilai δ	Perilaku Aktor	Outcome
Rendah	Fokus jangka pendek	Resistensi
Tinggi	Fokus jangka panjang	Kooperasi

Ketika δ tinggi, ancaman sanksi di masa depan menjadi kredibel (Abreu et al., 1990; Mailath & Samuelson, 2006). Dalam konteks Indonesia, audit pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan akan meningkatkan δ dengan menciptakan konsekuensi jangka panjang. Selain waktu, kredibilitas juga ditentukan oleh signaling berikut, tersaji dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Jenis Signaling *Cheap Talk* VS *Costly Signal*

Jenis Signal	Biaya	Outcome
Cheap talk	Rendah	*Pooling equilibrium*
Costly signal	Tinggi	*Separating equilibrium*

Cheap talk gagal mengubah ekspektasi karena tidak mengandung konsekuensi nyata (Crawford & Sobel, 1982), sedangkan *costly signals* meningkatkan kredibilitas (Spence, 1973). Contoh di Indonesia adalah digitalisasi BMN yang mengurangi diskresi dan meningkatkan transparansi.

Dalam konteks *multi-level governance*, reformasi juga menghadapi masalah koordinasi, misalnya koordinasi pusat dan daerah, seperti dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Jenis Masalah Koordinasi Pusat dan Daerah

	Daerah: Implementasi	Daerah: Tidak
Pusat: Implementasi	(4,4)	(1,2)
Pusat: Tidak	(2,1)	(2,2)

Ketidakpastian ekspektasi menyebabkan aktor memilih status quo (Van Huyck et al., 1990; Cooper et al., 1992). Ini menunjukkan bahwa kegagalan reformasi sering kali disebabkan oleh kegagalan koordinasi, bukan konflik kepentingan.

4. Mechanism Design dan Parameter Permainan

Analisis ini mengarah pada pergeseran fundamental: dari *policy design* ke *mechanism design* (Maskin, 2008; Myerson, 1982). Reformasi harus dilihat sebagai upaya mengubah parameter permainan, yang dijabarkan dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Identifikasi Jenis Parameter Permainan

Parameter	Makna	Instrumen Kebijakan
Δ	Orientasi masa depan	Audit, evaluasi
P	Probabilitas enforcement	Pengawasan, sanksi
C	Biaya sinyal	Reform nyata
Δ	Selisih insentif	Reward & punishment

Empat parameter utama menentukan hasil reformasi. Pertama, *discount factor* (δ) merefleksikan orientasi jangka panjang aktor. Peningkatan δ melalui audit, evaluasi, dan sistem karier, membuat aktor lebih mempertimbangkan konsekuensi masa depan, sehingga kerja sama menjadi lebih mungkin (Abreu et al., 1990; Mailath & Samuelson, 2006). Kedua, probabilitas enforcement (p) menentukan ekspektasi risiko. Semakin tinggi p, semakin besar biaya yang diharapkan dari resistensi, sehingga kepatuhan menjadi lebih rasional.

Ketiga, biaya sinyal (c) menentukan kredibilitas reformasi. Reformasi yang murah (*cheap talk*) tidak mengubah ekspektasi, sedangkan reformasi yang mahal (*costly signals*) meningkatkan kepercayaan karena hanya aktor yang berkomitmen yang bersedia menanggung biaya tersebut (Spence, 1973; Crawford & Sobel, 1982). Keempat, keselarasan insentif (Δ) merupakan inti

perubahan perilaku: ketika payoff kepatuhan melebihi resistensi, maka kepatuhan menjadi *best response*.

Dalam sistem multi-aktor, kompleksitas meningkat karena bargaining politik. Semakin banyak veto players, semakin besar kemungkinan *policy gridlock* (Tsebelis, 2002). Reformasi yang berhasil bukanlah yang paling ideal secara normatif, tetapi yang paling stabil secara strategis (Maskin, 2008; Myerson, 1982). Dalam konteks Indonesia, kasus delayering dan BMN menunjukkan bahwa kegagalan reformasi sering kali merupakan hasil rasional dari struktur insentif yang ada. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi hanya dapat dicapai jika kebijakan mampu menggeser keseimbangan menuju kerja sama yang stabil dan berkelanjutan.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan publik tidak dapat dipahami sebagai proses administratif yang bersifat linear, melainkan sebagai hasil dari interaksi strategis antar aktor dalam suatu struktur insentif tertentu. Dengan menggunakan kerangka teori permainan, reformasi dianalisis sebagai outcome keseimbangan yang ditentukan oleh ekspektasi rasional, kredibilitas institusional, serta konfigurasi kekuasaan. Temuan utama menegaskan bahwa kegagalan reformasi sering kali bukan disebabkan oleh kelemahan desain kebijakan, tetapi karena struktur insentif yang membuat resistensi menjadi pilihan rasional bagi aktor.

Model permainan statis menunjukkan bahwa ketika resistensi memberikan payoff lebih tinggi dibandingkan kepatuhan, maka reformasi akan terjebak pada keseimbangan tidak efisien (R,D). Namun, melalui kerangka permainan berulang, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerja sama dapat dipertahankan apabila aktor memiliki orientasi jangka panjang yang kuat, didukung oleh mekanisme pengawasan, reputasi, dan sanksi yang kredibel. Selain itu, analisis signaling menegaskan bahwa hanya reformasi yang memiliki biaya nyata (*costly signals*) yang mampu membangun kredibilitas dan mengubah ekspektasi aktor.

Dalam konteks Indonesia, kasus delayering birokrasi dan pengelolaan BMN memperlihatkan bahwa kegagalan implementasi sering kali merupakan konsekuensi rasional dari struktur insentif yang tidak selaras. Tanpa perubahan pada insentif, *enforcement*, dan kredibilitas, reformasi cenderung menghasilkan kepatuhan simbolik atau stagnasi. Hal ini diperkuat oleh dinamika koordinasi dalam sistem desentralisasi, di mana ketidakpastian antar aktor mendorong terciptanya keseimbangan *status quo* yang tidak optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi kebijakan publik pada dasarnya adalah masalah desain keseimbangan, bukan sekadar desain regulasi. Oleh karena itu, reformasi harus dipahami sebagai proses *strategic*

engineering yang bertujuan mengubah parameter utama dalam permainan, seperti orientasi jangka panjang, probabilitas penegakan, biaya sinyal, dan keselarasan insentif, sehingga kerja sama menjadi hasil yang stabil dan berkelanjutan.

Saran

Reformasi kebijakan publik perlu difokuskan pada perbaikan struktur insentif agar kepatuhan menjadi pilihan yang rasional, bukan sekadar kewajiban administratif. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan manfaat kepatuhan lebih tinggi daripada resistensi melalui sistem insentif yang jelas, pengukuran kinerja yang terarah, serta pengurangan peluang perilaku oportunistik.

Selain itu, keberlanjutan reformasi memerlukan penguatan mekanisme jangka panjang melalui monitoring, audit, dan penegakan aturan yang konsisten untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan. Dalam konteks desentralisasi, penyelarasan insentif antara pemerintah pusat dan daerah, misalnya melalui skema berbasis kinerja, menjadi kunci untuk mengatasi kegagalan koordinasi dan mendorong terciptanya kerja sama yang stabil.

Daftar Pustaka

Abreu, D., Pearce, D., & Stacchetti, E. (1990). Toward a theory of discounted repeated games with imperfect monitoring. *Econometrica, 58*(5), 1041–1063. https://doi.org/10.2307/2938297

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business. https://www.randomhousebooks.com/books/202714/

Aumann, R. J. (1987). Correlated equilibrium as an expression of Bayesian rationality. *Econometrica, 55*(1), 1–18. https://doi.org/10.2307/1911153

Baron, D. P. (1994). Regulatory policy and strategic behavior. *Handbook of Industrial Organization*. https://doi.org/10.1016/S1573-448X(05)80009-7

Baron, D. P., & Myerson, R. B. (1982). Regulating a monopolist with unknown costs. *Econometrica, 50*(4), 911–930. https://doi.org/10.2307/1912769

Bendor, J., Taylor, S., & Van Gaalen, R. (1985). Bureaucratic expertise versus legislative authority: A model of deception and monitoring in budgeting. *American Political Science Review, 79*(4), 1041–1060. https://doi.org/10.2307/1956246

Besley, T., & Persson, T. (2009). The origins of state capacity: Property rights, taxation, and politics. *American Economic Review, 99*(4), 1218–1244. https://doi.org/10.1257/aer.99.4.1218

Carlsson, H., & van Damme, E. (1993). Global games and equilibrium selection. *Econometrica, 61*(5), 989–1018. https://doi.org/10.2307/2951596

Chen, B. (2010). A belief-based approach to repeated prisoner's dilemma with private monitoring. *Journal of Economic Theory, 145*(1), 402–420. https://doi.org/10.1016/j.jet.2009.02.006

Cooper, R., DeJong, D. V., Forsythe, R., & Ross, T. (1992). Communication in coordination games. *Econometrica, 60*(3), 491–513. https://doi.org/10.2307/2951765

Crawford, V. P., & Sobel, J. (1982). Strategic information transmission. *Econometrica, 50*(6), 1431–1451. https://doi.org/10.2307/1913399

Dixit, A., & Nalebuff, B. (1991). *Thinking strategically: The competitive edge in business, politics, and everyday life*. W. W. Norton. https://wwnorton.com/books/9780393310351

Ely, J. C., Hörner, J., & Olszewski, W. (2005). Belief-free equilibria in repeated games. *Econometrica, 73*(2), 377–415. https://doi.org/10.3982/ECTA7397

Fudenberg, D., & Levine, D. K. (1989). Reputation and equilibrium selection in games. *Econometrica, 57*(4), 797–815. https://doi.org/10.2307/1913772

Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991). *Game theory*. MIT Press. https://mitpress.mit.edu/9780262061414/game-theory/

Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. *Political Studies, 44*(5), 936–957. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x

Harsanyi, J. C., & Selten, R. (1988). *A general theory of equilibrium selection in games*. MIT Press. https://mitpress.mit.edu/9780262081733

Heijmans, R. J. R. K. (2023). Unraveling coordination problems. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/2307.08557

Herrera-Medina, E. (2023). A game theoretic approach to collaboration in policy coordination. *Economies, 11*(10), 251. https://doi.org/10.3390/economies11100251

Holmström, B. (1979). Moral hazard and observability. *Bell Journal of Economics, 10*(1), 74–91. https://doi.org/10.2307/3003320

Horn, M. J. (1995). *The political economy of public administration*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529023

Kandori, M. (2002). Introduction to repeated games with private monitoring. *Journal of Economic Theory, 102*(1), 1–15. https://doi.org/10.1006/jeth.2001.2861

Keefer, P. (2007). Clientelism, credibility, and the policy choices of young democracies. *American Journal of Political Science, 51*(4), 804–821. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2007.00282.x

Keefer, P., & Stasavage, D. (2003). The limits of delegation: Veto players, central bank independence, and the credibility of monetary policy. *American Political Science Review, 97*(3), 407–423. https://doi.org/10.1017/S0003055403000760

Mailath, G. J., & Morris, S. (2002). Repeated games with almost-public monitoring. *Journal of Economic Theory, 102*(1), 189–228. https://doi.org/10.1006/jeth.2001.2875

Mailath, G. J., & Samuelson, L. (2006). *Repeated games and reputations*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195300799.001.0001

Majone, G. (1989). *Evidence, argument, and persuasion in the policy process*. Yale University Press. https://yalebooks.yale.edu/book/9780300042844

March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering institutions*. Free Press.

Maskin, E. (2008). Mechanism design: How to implement social goals. *American Economic Review, 98*(3), 567–576. https://doi.org/10.1257/aer.98.3.567

McCain, R. A. (2009). *Game theory and public policy*. Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781848445994

McCarty, N., & Meirowitz, A. (2007). *Political game theory*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511813795

Milgrom, P., & Roberts, J. (1990). Rationalizability, learning, and equilibrium in games with strategic complementarities. *Econometrica, 58*(6), 1255–1277. https://doi.org/10.2307/2938256

Myerson, R. B. (1982). Optimal coordination mechanisms in generalized principal-agent problems. *Journal of Mathematical Economics, 10*(1), 67–81. https://doi.org/10.1016/0304-4068(82)90006-4

Myerson, R. B. (1991). *Game theory: Analysis of conflict*. Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvjsf4kf

Nash, J. (1950). Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 36*(1), 48–49. https://doi.org/10.1073/pnas.36.1.48

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678

Osborne, M. J., & Rubinstein, A. (1994). *A course in game theory*. MIT Press.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Piccione, M. (2002). The repeated prisoner's dilemma with imperfect private monitoring. *Journal of Economic Theory, 102*(1), 70–83. https://doi.org/10.1006/jeth.2001.2862

Scharpf, F. W. (1997). *Games real actors play: Actor-centered institutionalism*. Westview Press.

Scharpf, F. W. (2001). The viability of advanced welfare states in the international economy. *Journal of European Public Policy, 8*(2), 190–228. https://doi.org/10.1080/13501760120056035

Selten, R. (1975). Reexamination of the perfectness concept for equilibrium points in extensive games. *International Journal of Game Theory, 4*(1), 25–55. https://doi.org/10.1007/BF01772219

Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics, 87*(3), 355–374. https://doi.org/10.2307/1882010

Straub, P. G. (1995). Risk dominance and coordination failures. *Quarterly Review of Economics and Finance, 35*(4), 339–360. https://doi.org/10.1016/1062-9769(95)90037-P

Sugaya, T., & Takahashi, S. (2013). Coordination failure in repeated games with private monitoring. *Journal of Economic Theory, 148*(5), 1891–1928. https://doi.org/10.1016/j.jet.2013.03.003

Tsebelis, G. (2002). *Veto players: How political institutions work*. Princeton University Press. https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691099897

Van Huyck, J. B., Battalio, R. C., & Beil, R. O. (1990). Tacit coordination games. *American Economic Review, 80*(1), 234–248. https://doi.org/10.1257/aer.80.1.234

von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of games and economic behavior*. Princeton University Press. https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691130613

Weingast, B. R. (1995). The economic role of political institutions: Market-preserving federalism. *Journal of Law, Economics, & Organization, 11*(1), 1–31. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jleo.a036861